



# APBD-P DKI 2015 Dituding Akal-akalan

**SOROTAN** masyarakat tertuju pada jumlah pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 66 triliun. Pasalnya, angka APBD Perubahan 2015 itu tersebut jauh lebih kecil dari APBD 2015 yang besarnya mencapai Rp 69,28 triliun. Diduga pengurangan nilai itu akal-akalan agar penyerapan anggaran bisa tercapai.

"Target Gubernur Ahok agar APBD terserap 90 persen tidak bisa tercapai kalau pagunya masih Rp 69,28 triliun. Untuk mencapai target ini, maka dikali dengan cara mengurangi total APBD dari Rp 69,28 triliun menjadi Rp 66 triliun," ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre for Budget Analysis

(CBA), kemarin (30/6).

Uchok juga mengatakan, dengan berkurangnya nilai APBDP ini, bakal berdampak kepada pajak. Artinya penerimaan dari pajak juga harus dikurangi.

"Sebab, kalau tidak dikurangi maka bisa diduga ada korupsi dalam bentuk mark down alias mengurangi pajak dari pendapatan sesungguhnya," kata dia juga.

Kemudian, lanjut Uchok, pengurangan pagu total dalam APBD-P 2015 ini akan berdampak kepada pembangunan di Jakarta.

"Artinya, porsi buat rakyat akan banyak dikurangi demi tercapai penyerapan yang diinginkan Gubernur Ahok sebesar 90 persen," terangnya juga ■

Sedangkan Koordinator Indonesia For Transparency And Akuntability (INFRA), Agus Chaerudin, mengatakan penyerapan APBD 2015 diprediksi tidak lebih dari 27 persen. Hal ini menunjukkan kualitas terburuk dari kinerja Pemprov DKI Jakarta sejak era Jakarta Baru dan kemunduran prestasi pembangunan DKI Jakarta yang sangat tidak terarah.

Jauh dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DKI 2007-2035. Karena itu, ujarnya Agus lagi, dirinya sangat tidak memahami pola kinerja TAPD DKI era Jakarta Baru dalam proses perumusan dan Pengajuan APBD Perubahan. Karena berdasarkan PP 58 Tahun 2005, TAPD wajib transparan pada publik terhadap perhitungan maksimal penggunaan/penyerapan Pergub APBD 2015 dan menjelaskan program Pembangunan yang akan dilaksanakan (dedicated).

Terutama pembangunan light rail

transport (LRT) wajib di jelaskan dasar hukum pelaksanaannya dan dasar hukum pembentukan BLUD LRT. Lantaran sampai saat ini hasil penelusuran INFRA, DPRD DKI belum pernah menyetujui pembangunan LRT dan pembentukan BLUD dalam paripurna yang berbentuk perda.

Karena itu, INFRA mendesak Kemendagri untuk mencoret Pengajuan Alokasi Pergub APBD P TA 2015 khususnya tentang pembangunan LRT, operasional BLUD LRT dan PMP pada BUMD. "Sebab, indikasi pengalihan APBD pada PMP BUMD merupakan bentuk KKN sistematis mengacu dan belajar dari LHP BPK RI atas APBD TA 2013 dimana PMP BUMD tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi merugikan keuangan Propinsi DKI," cetusnya juga.

Sementara itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI tengah merampungkan susunan APBD-P 2015 yang akan diajukan kepada Kementerian



Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, APBD-P 2015 diajukan ke Kemendagri tanpa adanya campur tangan DPRD DKI karena berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) DKI. Adapun besaran pagu anggaran yang diusulkan Pemprov DKI dalam APBD-P pada tahun ini sebesar Rp 66 triliun. "Untuk APBD-P besarnya Rp 66 triliun," katanya.

Nilai anggaran dalam APBD-P yang diajukan Pemprov DKI ke Kemendagri itu memanglebih kecil dari nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp 69,28 triliun. Namun perbedaan pagu anggaran itu dinilai tidak menjadi soal selama proses pencairan dana bisa segera dilakukan.

"Percuma juga kalau anggaran besar tapi uangnya tidak ada. Semuanya kan tergantung dari pajak dan pendapatan daerah," jelasnya juga. Meski jumlah anggaran yang diajukan lebih kecil, lanjut Saefullah, pendapatan daerah pada

tahun ini meningkat. Hal itu karena adanya banyak penghematan dari sejumlah pos anggaran seperti belanja pegawai yang berhasil dihemat Rp 4-5 triliun.

"Dari seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada penambahan dan pengurangan 1.012 kegiatan yang menghasilkan selisih Rp 1,9 triliun. Selain itu ada juga kelebihan anggaran di proyek Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp 2,4 triliun," ungkap juga mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Dia juga mengutarakan, kelebihan anggaran dalam APBD DKI tahun 2015 ini rencananya akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) BUMD Bank DKI dan PT Jakarta Properindo (PT Jakpro). "PT Jakpro kita akan kasih PMP buat pembangunan Wisma Atlet Kemayoran dan Light Rail Transit (LRT). Nanti mereka paparan dulu biar dipertimbangkan jumlah anggarannya. Jangan sampai besar di PMP-nya saja," tandasnya. (wok)